Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024
Halaman: 3806 – 3812

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

Kebijakan Kolonial Belanda dan Jepang terhadap Pendidikan Islam di Indonesia: Sebuah Studi Perbandingan

Suhaimi Bin Agus
Institut Agama Islam Rokan, Indonesia

suhaimibinagus8191@gmail.com

Kata Kunci:
Pendidikan Islam, Masa Kolonial, Belanda, Jepang, Kebijakan Pendidikan

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perkembangan pendidikan Islam di Indonesia selama masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang melalui metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan kebijakan yang signifikan antara kedua rezim. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai kebijakan represif terhadap pendidikan Islam, termasuk pembentukan badan pengawasan (Priesterraden), pembatasan izin mengajar, dan Ordonansi Sekolah Liar. Sebaliknya, meskipun lebih singkat, pendudukan Jepang memberikan ruang yang lebih besar bagi pengembangan pendidikan Islam. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor tujuan kolonial yang berbeda dan pengaruh jaringan intelektual Muslim dari Timur Tengah. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang strategi adaptasi pendidikan Islam dalam menghadapi tekanan politik, serta relevansinya bagi pengembangan pendidikan Islam modern yang tetap mempertahankan identitasnya namun mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Key Word:
Islamic education, colonial period, Dutch, Japanese, education policy

Abstract

This study examines the development of Islamic education in Indonesia during the Dutch colonial period and Japanese occupation through library research. The findings reveal significant policy differences between the two regimes. The Dutch colonial government implemented various repressive policies against Islamic education, including the establishment of a supervisory body (Priesterraden), teaching permit restrictions, and the Wild Schools Ordinance. In contrast, although shorter, the Japanese occupation provided more space for the development of Islamic education. These differences were influenced by varying colonial objectives and the impact of Muslim intellectual networks from the Middle East. The study offers important insights into the adaptation strategies of Islamic education in facing political pressures, as well as its relevance for the development of modern Islamic education that maintains its identity while adapting to changing times.

Copyright © 2024 Suhaimi Bin Agus
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia pada mulanya didasarkan pada Sistem kedaerahan dan tentu saja tidak terkoordinir dan terpusat seperti sekarang ini, sebab tiap-tiap daerah berusaha mengimplementasikan pendidikan dan pengajaran Islam menurut daerahnya masing-masing. Karenanya pendidikan Islam antara daerah yang satu dengan daerah yang lain akan berbeda, misalnya di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya.

Kondisi seperti itu sebelum orang-orang barat datang pertama kali dan menjamah bumi Nusantara ini. Meskipun dalam keadaan seperti itu ternyata islam dapat tersebar luas dipeluk sebagian besar atau mayoritas penduduk Nusantara, bahkan agama Islam pernah menjadi agama resmi pada masa kerajaan Pasai di Aceh abad ke-13 dan Kerajaan Demak di Jawa Tengah akhir abad ke 15 M.

Usaha penakhlukan yang dilakukan oleh bangsa Barat (Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda) atas dunia timur dimulai dengan jalan perdagangan yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kekuatan militer. Mereka mengenal dunia timur sebagai penghasil rempah-rempah yang sangat mereka perlukan, untuk itulah mereka berlomba untuk mendapatkannya.

Sebagai rentetan dari peristiwa kedatangan orang-orang Barat ke Timur, pada tahun 1556 orang Belanda merapatkan kapalnya di pelabuhan Banten yang dipimpin oleh Cornelis De Houtmen dan De Keyzer. Kehadiran Belanda yang membawa misi ganda yaitu imperialis dan kristenisasi, justru sangat merusak dan menjungkir balikkan tatanan yang sudah ada. Tidak heran jika pada waktu itu di berbagai daerah timbul pemberontakan melawan penjajah. Keadaan pendidikan Islam pada masa penjajahan, baik semasa kolonial maupun pada masa Jepang, yang diperkirakan sudah barang tentu sangat berbeda dengan pelaksanaan pendidikan Agama Islam sekarang ini.

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan bagi pengembangan pendidikan Islam di era modern. Dengan menganalisis kebijakan kolonial Belanda dan Jepang, temuan penelitian ini dapat memberikan pelajaran historis tentang ketahanan sistem pendidikan Islam dalam menghadapi tekanan politik dan upaya marginalisasi. Di satu sisi, praktik represif Belanda yang membatasi pendidikan Islam justru memicu inovasi di kalangan ulama, seperti pendirian madrasah dan integrasi kurikulum. Di sisi lain, kebijakan Jepang yang relatif lebih longgal menunjukkan bagaimana fleksibilitas dapat menjadi strategi bertahan di tengah keterbatasan. Pemahaman ini penting bagi para praktisi pendidikan Islam modern untuk merancang strategi adaptif dalam menghadapi tantangan globalisasi, sekularisasi, atau kebijakan pendidikan nasional yang dinamis. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran jaringan ulama transnasional (Mekkah-Mesir) dalam pembaruan pendidikan, yang dapat menjadi inspirasi bagi penguatan kerjasama internasional antarlembaga pendidikan Islam kontemporer. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga menawarkan refleksi kritis bagi pengembangan pendidikan Islam yang relevan dengan konteks kekinian, tanpa kehilangan identitas keislamannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Fokus penelitian adalah menganalisis perkembangan dan kebijakan pendidikan Islam selama masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, termasuk buku, jurnal ilmiah, dokumen sejarah, dan publikasi terkait lainnya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam konteks historis dan kebijakan pendidikan pada masa kolonial.

Pengumpulan data dilakukan melalui eksplorasi literatur sistematis dengan kriteria tertentu. Sumber primer yang digunakan meliputi dokumen kebijakan kolonial, seperti *Ordonansi Sekolah Liar (Wilde School Ordonantie)* tahun 1932, serta catatan dan laporan dari tokoh-tokoh sejarah seperti Snouck Hurgronje. Sumber sekunder meliputi buku teks sejarah pendidikan Islam, artikel jurnal, dan karya akademis lain yang relevan. Prioritas diberikan kepada sumber-sumber peer-reviewed dan terbitan lembaga terpercaya untuk memastikan keakuratan data.

Analisis data dilakukan secara tematik dan kronologis. Pertama, data dikategorikan berdasarkan periode waktu (masa Belanda dan Jepang) dan tema utama, seperti kebijakan pendidikan, respons ulama, dan pengaruh jaringan intelektual Muslim dari Timur Tengah. Teknik koding digunakan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar data. Selanjutnya, dilakukan triangulasi dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk memvalidasi hasil penelitian. Proses interpretasi data bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang perbedaan kebijakan Belanda dan Jepang serta dampaknya terhadap pendidikan Islam.

Validitas penelitian dijaga melalui beberapa cara. Kredibilitas data dijamin dengan menggunakan sumber-sumber akademis dan arsip yang otentik. Transferabilitas temuan dikaitkan dengan konteks sosio-historis masa kolonial, sehingga hasil penelitian dapat dipahami dalam kerangka waktu yang spesifik. Selain itu, audit trail dilakukan dengan mendokumentasikan secara transparan proses pemilihan dan penggunaan sumber, termasuk alasan mengutip karya-karya tertentu seperti buku Zuhri (1978) sebagai rujukan awal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, keterbatasan akses ke arsip kolonial berbahasa Belanda atau Jepang dapat mempengaruhi kedalaman analisis. Kedua, dominasi sumber sekunder mengharuskan peneliti untuk melakukan analisis kritis guna menghindari bias interpretasi. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pendidikan Islam selama masa penjajahan dan implikasinya terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBHASAN

Pendidikan Agama Islam Zaman Penjajahan Belanda

Sejak tersebarnya Islam di Nusantara, banyak berdiri mesjid-mesjid. Disamping sebagai tempat ibadah. Mesjid juga dijadikan sebagi pusat kegiatan (pendidikan) Islam. Dengan demikian jenis pendidikan agama di awal-awal berkembangnya Islam di Indonesia adalah nonformal, yang kian hari bertambah seiring dengan pertambahan jumlah mesjid. Sesuai tempatnya di mesjid, pelaksanaan pendidikan agama islam banyak dalam bentuk pengajian dengan maksud dan tujuan: 1) Untuk mengajak manusia berbuat baik, yaitu patuh mengerjakan agama secara sungguh-sungguh, dalam arti mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangNya; 2) Untuk menjaga tradisi, maksudnya sesuatu yang dianggap penting dan diperlukan oleh keluarga dan masyarakat, harus diturunkan dan diajarkan kepada anak cucu secara turun temurun sebagai regenerasi.

Adapun metode yang digunakan oleh para penyebar agama islam saat itu menggunakan berbagai cara yang ditempuh, diantaranya adalah melalui: ceramah atau nasihat langsung, teladan yang baik dan media

kesenian dan permainan. Mengenai metode yang terakhir ini kesenian wayang dianggap paling efektif, begitu pula dengan gamelan sekaten.

Kedatangan bangsa Barat di satu pihak memang telah membawa kemajuan di bidang pendidikan, Mereka telah memperkenalkan system dan metode baru dan tentu saja lebih efektif. Namun dipihak lain, apa yang dilakukan itu tidak lebih dari sekedar untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang dapat membantu kepentingan penjajah apa yang mereka sebut pembaharuan pendidikan, tidak lain adalah westernisasi dan kristenisasi yang untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang mewarnai kebijakan penjajahan Belanda di Indonesia yang berlangsung selama 3,5 abad. Didalam dada penjajah tersebut begitu kuatnya ajaran politikus curang dan licik Machiavelli, yang antara lain mengajarkan: 1) Agama sangat diperlukan bagi pemerintah penjajah; 2) Agama tersebut dipakai untuk menjinakkan dan menaklukkan rakyat; 3) Setiap aliran agama yang dianggap palsu oleh pemeluk agama yang bersangkutan harus dibawa untuk memecah belah dan agar mereka berbuat untuk mencari bantuan kepada pemerintah; 4) Janji dengan rakyat tak perlu ditepati jika merugikan; 5) Tujuan dapat menghalalkan segala cara.

Penjajah Belanda mengeluarkan kebijakan yang mengatur jalannya pendidikan. Tentu saja untuk kepentingan mereka sendiri terutama untuk kepentingan agama Kristen. Ketika Van De Boss menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta pada tahun 1931, keluarlah kebijaksanaan bahwa sekolah Gereja dianggap penting dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah. Sedang yang Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu, sementara di setiap daerah ke Residenan didirikan satu sekolah agama Kristen.

Mengenai inisiatif untuk mendirikan lembaga pendidikan bagi penduduk pribumi adalah ketika Van Der Capellen menjabat sebagai Gubernur Jenderal. Pada waktu itu keluar surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh bupati, yang isinya adalah: "Dianggap penting untuk secepatnya mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat mentaati undang-undang dan hukum negara yang diterapkan Belanda.

Sedangkan pendidikan Agama Islam yang telah ada baik di mesjid atau Mushalla maupun di Pesantren atau yang lainnya dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Para santri pondok masih dianggap buta huruf latin, yang secara resmi menjadi acuan pada waktu itu. Politik Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya didasari oleh adanya rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya (Kristen) dan rasa kolonialismenya. Dengan begitu mereka menerapkan berbagai peraturan kebijakan, diantaranya: 1) Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut Priesterraden. Dari badan inilah maka pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah Belanda; 2) Tahun 1925 keluar lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama islam yaitu bahwa tidak semua orang (kiai) boleh memberikan pelajaran mengaji terkecuali telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintah Belanda; 3) Kemudian tahun 1932 keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada Izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda, yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*)."

Dalam rangka penekanan terhadap Islam dan pendidikan Islam, berbagai usaha ditempuh pihak Belanda, antara lain: mempelajari dengan sebaik-baiknya secara mendalam dan ilmiah di negeri Belanda hal ihwal pribumi dan islam di Indonesia, yang akhirnya menjadi suatu disiplin ilmu khusus yang disebut dengan Indologi. Menerapkan nasihat Snouck Hurgronje menjadi kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam di Indonesia. Inti dari nasihat atau saran Snouck Hurgronje ialah: 1) Menyarankan kepada pemerintah Hindia Belanda agar netral terhadap agama yakni tidak campur tangan dan tidak memihak kepada salah satu agama yang ada (tapi tampaknya hal ini hanya bersifat teori belaka, sebab faktanya tidaklah demikian). Menurutnya, fanatisme Islam itu akan luntur sedikit demi sedikit melalui proses pendidikan secara evolusi; 2) Pemerintah Belanda diharapkan dapat membendung masuknya Pan Islamisme yang sedang berkembang di Timur Tengah, dengan jalan menghalangi masuknya buku-buku atau brosur lain dari luar ke wilayah Indonesia, mengawasi kontak langsung dan tidak langsung tokoh-tokoh Islam Indonesia dengan tokoh luar, serta membatasi dan mengawasi orang-orang yang pergi ke Mekkah, dan bahkan kalau memungkinkan melarangnya sama sekali. Karena dikhawatirkan pengalaman yang ia dapatkan diluar akan dibawa pulang ke Indonesia dan mempengaruhi kelanggengan kekuasaan Kolonial.

Jika dilihatkan demikian ketatnya peraturan-peraturan pemerintah Belanda, tampaknya dalam waktu tidak lama, niscaya pendidikan islam akan menjadi lumpuh dan porak peranda. Akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Apa yang disarankan oleh Snouck Hurgronje ternyata banyak yang meleset. Banyak tokoh-tokoh agama Islam di Indonesia yang mendapatkan brosur-brosur dan majalah-majalah terlarang dari Timur Tengah dan Negara-negara Islam lainnya, atau dalam bentuk pengaruh yang lain. Kenyataan lainnya adalah

orang-orang Islam yang berpendidikan Barat pun tidak kehilangan identitasnya sebagai muslim, justru mempertebal keyakinan agama dan memperkokoh nasionalisme mereka.

Oleh sebab itu benar sekali apa yang dikemukakan oleh Wertheim bahwa apapun politik terhadap Islam yang akan dilancarkan oleh kekuasaan non-islam, hasilnya senantiasa berbeda dari apa yang ingin dikejar kekuasaan tersebut. Untuk melihat perkembangan pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda, para ahli telah membuat semacam priodesasi, yaitu: a) Pendidikan Islam sebelum tahun 1900; b) Pendidikan Islam pada masa peralihan (1900-1908); c) Pendidikan Islam sesudah tahun 1909. Secara ringkas, priodrsasi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Pendidikan Islam Sebelum Tahun 1990

Sebelum tahun 1990, kita mengenal pendidikan Islam secara perorangan, secara rumah tangga dan secara surau/langgar atau mesjid. Pendidikan secara perorangan dan rumah tangga itu lebih mengutamakan pelajaran praktis, misalnya tentang ketuhanan, keimanan, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah. Pemisahan mata pelajaran tertentu belum ada dan pelajaran yang diberikan pun belum lagi secara sistematis.

Sedangkan pendidikan surau mempunyai dua tingkatan yaitu: pelajaran Al-Qur'an dan pengkajian kitab. Mula-mula anak belajar mengaji, setelah selesai dilanjutkan dengan pengkajian kitab meliputi ilmu sharaf, nahwu, tafsir dan lain-lain. Ciri pendidikan pada masa ini adalah: 1) Pelajaran diberikan satu demi satu; 2) Pelajaran ilmu sharaf didahulukan dari ilmu nahwu; 3) Buku pelajaran pada mulanya dikarang oleh ulama Indonesia dan diterjemahkan kedalam bahasa daerah setempat; 4) Kitab yang digunakan umumnya ditulis tangan; 5) Pelajaran suatu ilmu, hanya diajarkan dalam satu macam buku saja; 6) Toko buku belum ada, yang ada hanyalah menyalin buku dengan tulisan tangan; 7) Karena terbatasnya bacaan, materi ilmu agama sangat sedikit; 8) Belum lahir aliran baru dalam Islam.

Pada periode ini memang sulit untuk menentukan secara pasti kapan dan dimana surau atau langgar dan pesantren yang pertama kali berdiri. Kendati demikian dapat diketahui bahwa pada abad ke 17 Masehi di Jawa telah telah terdapat pesantren Sunan Bonang di Tuben, Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Giri di Sidomukti Giri dan sebagainya. Namun sebenarnya jauh sebelum itu telah ada sebuah pesantren di hutan Glagah Arum (sebelah selatan Jepara) yang didirikan Raden Patah pada tahun 1475 M. Sementara itu di Sumatera, tempat pengajian berupa surau jauh sebelum itu sudah dikenal. Akan tetapi sebagai disebutkan di atas, terlalu sulit untuk mengetahui secara pasti tahun berapa dan dimana itu berdiri.

Pendidikan Islam pada Masa Peralihan

Jika pada periode sebelumnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam masih relative sedikit dan berlangsung secara sederhana, namun setelah itu yang disebut priode peralihan telah banyak berdiri tempat-tempat pendidikan terkenal di Sumatera, seperti Surau Parabek di Bukit Tinggi (1908) yang didirikan oleh Syeikh H.Ibrahim Parabek dan di Pulau Jawa seperti Pesantren, Tebuireng, namun system madrasah masih bukan dikenal.

Periode peralihan ini boleh dikatakan dipelopori oleh Syeikh Khatib Minangkabau dan kawan-kawan yang banyak mendidik dan mengajar di Mekah, termasuk para pemuda Indonesia dan Malaya. Murid-murid beliau seperti H.Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka) yang mengajar disurau Jembatan Besi Padang Panjang, KH.Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) di Yogyajkarta dan KH. Adnan di Solo. Juga termasuk KH.Hasyim Asy'ari pendiri pesantren Tebuireng dan Nadhatul Ulama. Murid-murid beliau sekembalinya dari Mekkah ikut andil dalam pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia.

Akan tetapi jauh sebelum Syeikh Khatib Minangkabau, pada awal abad 19 telah dikenal nama-nama seperti Haji Abdurrahman Piobang, Haji Miskin dan Haji Muhammad Arif Sumanik, mereka adalah alumni Mekkah yang kembali ke Sumatera pada tahun 1802, kemudian kembali lagi ke Mekkah dan belajar disana, terpengaruh dengan faham Wahabi. Sekembalinya mereka dari Mekkah, melahirkan kaum muda dan kaum tua di Indonesia. Selain pengaruh Mekah, pendidikan islam Indonesia saat itu juga terpengaruh dan pembaharuan di Mesir. Dalam hal ini Syeikh Taha Jalaluddin dianggap salah seorang pembaharu di bidang pendidikan yang banyak memperkenalkan faham Muhammad Abduh di Indonesia.

Pelajaran agama Islam pada masa peralihan ini bercirikan hal-hal sebagai berikut: a) Pelajaran untuk dua sampai enam ilmu dihimpun secara sekaligus; b) Pelajaran ilmu Nahwu didahulukan atau disamakan dengan ilmu sharf; c) Buku pelajaran semuanya karangan ulama Islam Kuno dan dalam bahasa Arab; d) Buku-buku semuanya dicetak; e) Suatu ilmu diajarkan dari beberapa macam buku; f) Telah ada toko buku yang memesan buku-buku dari Mesir atau Mekkah; g) Ilmu agama telah berkembang luas berkat banyaknya buku bacaan; h) Aliran baru dalam Islam seperti yang dibawa oleh Majalah al Manar di Mesir mulai lahir.

Dengan demikian terlihat bahwa pendidikan Islam setelah tahun 1900 sudah banyak mengalami kemajuan. Padahal waktu itu kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam Indonesia

sedang ketat-ketatnya. Disamping itu Belanda juga sedang gencar-gencarnya mempropagandakan pendidikan yang mereka kelola, yaitu pendidikan yang berbau diskriminasi antara golongan pribumi dengan golongan priyayi atau pejabat bahkan yang beragama Kristen.

Pendidikan Islam Sesudah Tahun 1909

Periode ini ditandai dengan kesadaran untuk memperkuat persatuan, diawali dengan tampilnya Budi Utomo tahun 1908. Selain semangat nasionalisme yang berkembang, kesadaran para ulama-ulama tentang pendidikan Islam juga berkembang. Mereka menyadari bahwa system pendidikan langgar dan pesantren tradisional sudah tidak begitu sesuai lagi dengan iklim Indonesia saat itu. Maka dirasakan kebutuhan untuk memberikan pelajaran agama dilembaga pendidikan dalam bentuk madrasah atau sekolah yang lebih teratur.

Madrasah Adabiyah berdiri pada tahun 1909 di Padang dipimpin Syaikh Abdullah Ahmad, madrasah Diniyah di Padang Panjang dipimpin oleh Zainuddin Labai dan El Yunusi tahun 1915. Sementara itu surau pertama yang memakai system kelas dalam proses belajar mengajarnya adalah Sumatera Thawalib Padang Panjang yang dipimpin oleh Syeikh Abdul Karim Amrullah tahun 1921.

Pada tahun yang sama Syeikh Ibrahim Musa melakukan hal yang sama di Sumatera Parabek Bukitinggi. Sedang madrasah Aceh ialah madrasah Sa'adah Adabiyah yang didirikan oleh Jam'iyyah Diniyah pimpinan T. Daud Beureuh tahun 1930 di Belang Posen Sigli. Kemudian di Jawa tahun 1919 KH.Hasyim Asy'ari mendirikan madrasah Salafiyah di Tebuireng Jombang." Dapat dikatakan pada periode ini system pendidikan madrasah sudah dikenal hampir diseluruh wilayah Indonesia.

Hasil Penelitian

Berdasarkan fakta dalam sejarah bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum mencerminkan persatuan yang utuh, tetapi perjuangan bangsa Indonesia, masih bersifat kedaerahan, seperti perjuangan yang ditunjukkan oleh rajara-raja yang berkuasa yang ada pada waktu itu. Kerajaan-kerajaan yang kuat sajalah yang bias bertahan membela daerahnya, bagi kerajaan kecil tentu tergantung bagaimana usaha raja bias bekerja sama dengan kerajaan lain dalam mempertahankan daerah kekuasaannya itu.

Beberapa Ciri Umum Politik Pendidikan Belanda Politik pendidikan colonial erat hubungannya dengan politik mereka pada umumnya, suatu politik yang didominasi oleh golongan yang berkuasa dan tidak didorong oleh nilai-niتعل etis dengan maksud untuk membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah jajahannya. Berhubungan dengan sikap itu dapat kita lihat sejumlah ciri politik dan prakti pendidikan tertentu. Menurut Prof. Dr. S. Nasution mengemukakan enam ciri umum politik pendidikan Belanda, yaitu: 1) System Dualisme; 2) System Korkondasi; 3) Sentralisasi; 4) Menghambat gerakan Nasional; 5) Perguruan swasta yang militer; 6) Tidak adanya perencanaan pendidikanyan sistematis; 7) System Dualisme.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber historis dan kebijakan kolonial, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks selama masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pertama, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan yang bersifat represif terhadap pendidikan Islam, seperti pengawasan ketat melalui *Priesterraden* (1882), pembatasan izin mengajar (1905), dan *Ordonansi Sekolah Liar* (1932). Kebijakan ini bertujuan untuk menghambatperkembangan Islam sekaligus mempromosikan agenda kristenisasi dan westernisasi. Kedua, berbeda dengan

Belanda, pendudukan Jepang yang lebih singkat justru memberikan ruang lebih longgar bagi pendidikan Islam, meskipun dimotivasi oleh kepentingan politik dan militer Jepang sendiri. Perbedaan kebijakan kedua rezim ini tidak terlepas dari dua faktor utama: (1) perbedaan tujuan kolonial, di mana Belanda berorientasi pada eksploitasi jangka panjang sedangkan Jepang fokus pada mobilisasi sumber daya perang; dan (2) pengaruh pembaruan pemikiran Islam dari Timur Tengah (Mekkah-Mesir) yang memicu inovasi sistem pendidikan lokal, seperti transformasi surau menjadi madrasah. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendidikan Islam tidak hanya bertahan tetapi juga beradaptasi melalui strategi kultural-intelektual, seperti jaringan ulama dan integrasi metode pembelajaran.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk: 1) Mengeksplorasi lebih dalam dokumen arsip berbahasa Belanda/Jepang guna melengkapi perspektif kebijakan colonial; 2) Menganalisis peran perempuan muslimah dalam pendidikan Islam masa kolonial yang belum banyak terungkap; 3) Mengkaji relevansi model pendidikan Islam era kolonial (seperti pesantren-surau) dalam konteks pendidikan multikultural saat ini. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada historiografi pendidikan Islam, tetapi juga menawarkan inspirasi praktis bagi penguatan pendidikan Islam modern yang berakar pada kearifan lokal namun responsif terhadap tantangan zaman.

DAFTAR REFERENSI

Ahyar, D. B., Prihastari, E. B., Setyaningsih, R., Rispatiningsih, D. M., Zanthy, L. S., Fauzi, M., & Kurniasari, E. (2021). *Model-model pembelajaran*. Pradina Pustaka.

Amirah, I., Anggoro, B. S., & Gunawan, W. (2023). The implementation of accelerated learning model assisted by Autograph on students' adaptive reasoning ability and environmental literacy. *Online Learning in Educational Research, 3*(2).

Anam, H. (2017). Model accelerated learning pendidikan agama Islam. Jurnal El-Hamra: Kependidikan dan Kemasyarakatan, 2(1).

Arta, K. S. (2018). Pelatihan penulisan artikel untuk publikasi di jurnal ilmiah untuk meningkatkan profesionalisme bagi guru-guru di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial Ke-2, Universitas Pendidikan Ganesha.

Asyafah, A. (2019). Menimbang model pembelajaran (kajian teoretis-kritis atas model pembelajaran dalam pendidikan Islam). *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education, 6*(1).

Azra, A. (2000). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Logos Wacana Ilmu.

Darinda Sofia, Tanjung, Pinem, I., Mailani, E., & Ambarwati, N. F. (2024). *Penelitian tindakan kelas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Dewi, P. K., Rizal, M. S., Ardhian, D., Hardinata, V., & Lestari, Y. D. (2017). Pelatihan penulisan artikel ilmiah berbasis penelitian tindakan kelas pada guru SMP. *Jurnal Abdi, 2*(2).

Gobee, E., & Cadrianse, C. (1993). *Nasehat-nasehat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda* (Seri Khusus INIS VIII). Jakarta: INIS.

Goto, K. I. (1992). *Jepang dan pergerakan kemerdekaan Indonesia* (H. Otsuka, N. Rahmat, & D. Mulyadi, Penerj.). Yayasan Obor.

Hasbullah. (1995). *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan sejarah pertumbuhan dan perkembangan*. PT. Raja Grafindo Persada.

Herlina, R., Kurnia, A. D., & Faridah, D. (2018). Teachers' perception on classroom action research in English education among English teachers in Ciamis West Java. *Journal of Applied Linguistics and Literacy, 2*(1).

Irsan, A. (2007). *Budaya dan perilaku politik Jepang di Indonesia*. Grafindo Khasanah Ilmu.

Junaidi, J. (2019). Peran media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan, 3*(1).

Khoerunnisa, P., & Aqwal, S. M. (2020). Analisis model-model pembelajaran. *Fondatia, 4*(1).

Machali, I., & Fauzi, M. S. (2021). *Ensiklopedia tematik teori-teori pendidikan*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

Maryana, O., Arifin, M., & Trianto, A. (2019). Perbedaan kemampuan penalaran yang diajar menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dan tanpa menggunakan model pembelajaran berbasis proyek siswa kelas VII SMPN 3 Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Korpus, 3*(3), 334–341.

Muhaimin, H. (2005). *Nuansa baru pendidikan Islam*. Raja Grafindo Persada.

Nasir, M. (2021). Pemanfaatan model accelerated learning dalam meningkatkan kemampuan numerasi siswa SD. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 1*(3).

Noer, D. (1980). *Gerakan modern Islam di Indonesia*. LP3ES.

Rahmiati, R., & Nelyarni, N. (2021). Teori belajar accelerated learning dalam meningkatkan motivasi belajar. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 5*(1), 255–260.

Rika, R., Agustina, N. R., & Cahyadi, A. (2024). Model pembelajaran inovatif dalam PAI (Konsep dan macam-macam model pembelajaran inovatif dalam PAI). *Berajah Journal, 4*(2).

Rohayati, E. (2018). Efektivitas penerapan model pembelajaran advance organizer berbasis peta konsep untuk mata kuliah qawaid terhadap daya ingat mahasiswa. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, 2*(1).

Rohmatika, R. V. (2022). Model accelerated learning untuk peningkatan kompetensi fiqh pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan, 7*(1).

Rusman, R. (2023). Implementasi pembelajaran konstruktivisme dengan strategi generatif learning terhadap peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah 09 Surabaya. *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam, 12*(1).

Saidi, R. (1984). *Pemuda Islam dalam dinamika anak bangsa 1925–1954*. Rajawali.

Sidi, B. I. (1981). *Pengaruh timbul acara pendidikan Islam dan pergerakan nasional di Minangkabau*. Gunung Tiga.

Siregar, S., & Sitompul, H. (2018). The instructional and nurturant effect of experiential learning on concrete stones practice.

Stringer, E. T. (2007). *Action research* (3rd ed.). Sage Publications.

Suprijono, A. (2019). Pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas XII IPS mata pelajaran sejarah di SMA Negeri Kabuh, Jombang. *PRISMATIKA: Jurnal Pendidikan dan Riset Matematika, 7*(3).

Sururin. (2004). *Ilmu jiwa agama*. Raja Grafindo Persada.

Syah, M. N. S. (2016). Classroom action research as professional development of teachers in Indonesia. *Jurnal Tarbawi, 13*(1).

Syahmani, Rusmansyah, Winarti, A., & Almubarak. (2020). Penulisan artikel ilmiah berbasis penelitian tindakan kelas (PTK) untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di SMA Banjarmasin Kalimantan Selatan. *Jurnal Terapan Abdimas, 5*(2).

Yunus, M. (1985). *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia*. Hidakarya Agung.

Zuhairini, Z., Ghofir, A., Fadjar, M. A., & Fatah, S. (1986). *Sejarah pendidikan Islam*. Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Departemen Agama RI.

Zuhri, S. (1978). *Sejarah kebangkitan Islam dan perkembangannya di Indonesia*. PT. Al-Ma'arif.